



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TAHUN 2023 – 2026



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 – PANGKALPINANG

Telp./Fax. (0717) 436534

Website: <http://bpad.babelprov.go.id>

E-mail: bpad.babel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian terutama kepada Tim Renstra 2023-2026 atas bantuan, maupun partisipasinya dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 ini.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur pembangunan Kearsipan Dan Perpustakaan terkait yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saling bahu-membahu dalam Mendukung terwujudnya Indonesia maju berdaulat, mandiri dan berperikebadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi guna mewujudkan Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung *“Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul Di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien Dan Cepat Berbasis Teknologi”*.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan pembangunan Kearsipan Dan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Maret 2022

**KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**RAKHMADI, S.Pd, M.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198903 1 012**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.	13
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DKPUS.....	13
2.2. Sumber Daya DKPUS.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan DKPUS.....	19
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKPUS.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Terpilih..	42
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra DKPUS Prov.Kep.Bangka Belitung.....	44
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48

	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.	51
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DKPUS. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	62
	5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	62
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF.	65
	6.1. Program Strategis.....	65
	6.2. Kegiatan Strategis.....	66
	6.3. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran..	76
	6.4. Pendanaan Indikatif.....	77
BAB VII	KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.	101
BAB VIII	PENUTUP.	106

DAFTAR TABEL & GAMBAR

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 – 2022	20
Tabel T-C.24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2018 - 2022	27
Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.	41
Tabel T-C.25 Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebelum Perubahan Tahun 2018-2022	58
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan.	63
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	80
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	103

	Halaman
DAFTAR GAMBAR	v
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	15

Gambar 2.2 Pegawai DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Urutan Kepangkatan Tahun 2021.	17
Gambar 2.3 Pegawai DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021	18
Gambar 2.4 Peta Jabatan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eselonering Tahun 2021.	18
Gambar 6.1.A Kegiatan Strategis DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebelum Renstra Perubahan 2018-2020	67
Gambar 6.1.B Kegiatan Strategis DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebelum Renstra Perubahan 2021-2022	69
Gambar 7.1 Indikator Tujuan, Sasaran RPJMD	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Renstra Perubahan DKPUS) merupakan dokumen perencanaan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra ini merupakan dokumen yang memuat isi Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tujuan, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerja untuk mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra DKPUS merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi kewenangan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga, DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DKPUS Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dari tersusunnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari provinsi yang mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 menjadi acuan ataupun pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan yang disinkronkan dengan program/kegiatan Kementerian/Lembaga.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 menjadi Daerah Otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai lembaga teknis daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:



a. Landasan Idiil

Landasan Idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional yaitu UUD RI 1945,

c. Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Bab XI Pasal 36 Ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jalur Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Maupun Masyarakat;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam. Film Cerita atau Dokumenter;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pengalihan Dokumen Ke Dalam Micro Film atau Media Lainnya Dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Ke Dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
27. Keputusan Menteri dalam Negeri No omor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
28. Keputusan Menteri dalam Negeri No omor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 Tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KPE/M.PAN/2/2002 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;



35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/MENPAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke Dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
42. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;



43. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
44. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Program Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
45. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan mempedomani RPJMN 2015-2019 dan Renstranas Perpustakaan Nasional RI 2020 - 2024. Renstra DKPUS sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan bidang Kearsipan Dan Perpustakaan khususnya yang menjadi tugas dan fungsi pokok DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Kearsipan Dan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan yang transparan dan akuntabel.

Maksud penyusunan Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Pedoman bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sebagai amanah Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sebagai Dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
3. Menyelaraskan pelaksanaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan di Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Mempermudah pengendalian dan evaluasi Program dan Kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan berbasis penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi DKPUS dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Nasional pada umumnya serta Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Tujuan dari penyusunan Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun;
3. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan Kearsipan Dan Perpustakaan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Mewujudkan penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan secara cepat, tepat dan terpadu oleh DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) sampai sasaran (benefit/manfaat) dan tujuan (impact/dampak) harus benar dan lengkap.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proses penyusunan Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kedudukan Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berskala Nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.**
- 2.2. Sumber Daya DKPUS.**
- 2.3. Kinerja Pelayanan DKPUS.**
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKPUS.**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- 3.2. Telahaan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Terpilih.**
- 3.3. Telahaan Renstra K/L Dan Renstra DKPUS Prov.Kep.Bangka Belitung.**
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DKPUS. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN INDIKATIF.**

6.1. Program Strategis

6.2. Kegiatan Strategis

6.3. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran

6.4. Pendanaan Indikatif

**BAB VII KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

BAB VIII PENUTUP.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPUS

Tugas :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Yang sebagaimana dimaksud pada tugas tersebut ialah :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:



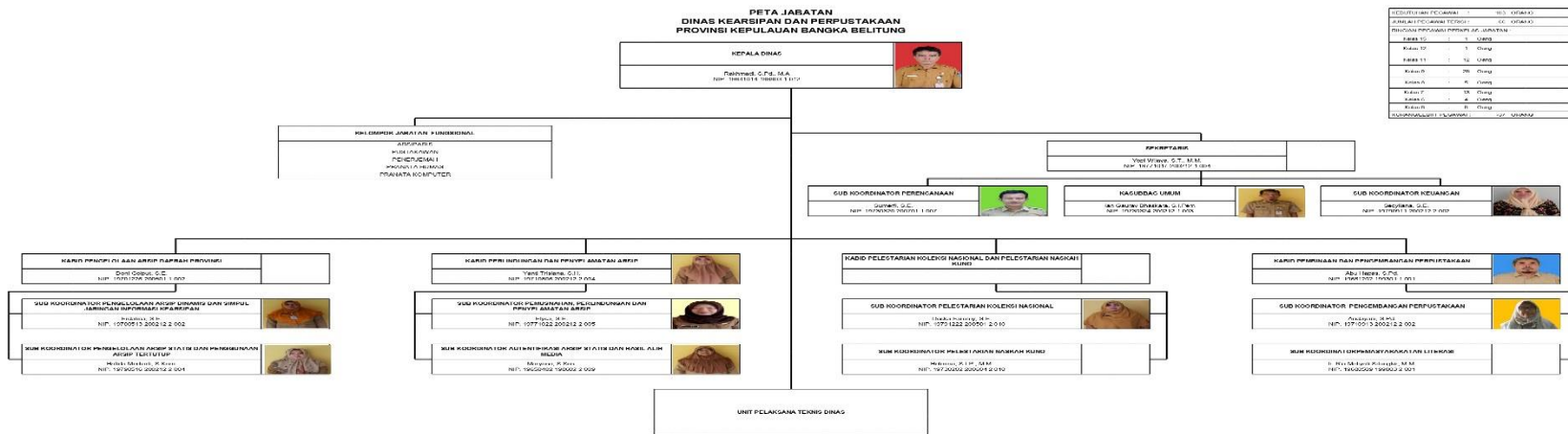
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Himpunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 742
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi :

Untuk dapat melihat Struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



2.2 Sumber Daya DKPUS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bab XX Pasal 362 bahwa Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Penggunaan Arsip Tertutup;
- d. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemusnahan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
 - 2. Seksi Autentifikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media;
- e. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah Kuno, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelestarian Koleksi Nasional; dan
 - 2. Seksi Pelestarian Naskah Kuno;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Pemasyarakatan Literasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Kepegawaian

Pada tahun 2022 jumlah pegawai pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 67 orang.

- a. Pegawai yang ditempatkan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan daftar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Pegawai DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan Tahun 2022

No.	Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya, / IV.d	1
2	Pembina Tk. I, / IV.b	11
3	Pembina Tk. I, / IV.a	4
4	Penata Tk I, / III.d	20
5	Penata, / III.c	15
6	Penata Muda Tk. I, / III.b	6
7	Penata Muda, / III.a	7
8	Pengatur Tk. I, / II.d	3
9	Pengatur, / II.c	-
10	Pengatur Muda TK.I / II.b	-
11	Pengatur Muda Tk. I, / II.a	-
	Jumlah	67

**Sumber Data DKPUS sampai dengan 31 Januari 2022*

Pegawai yang ditempatkan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3
Pegawai DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana / S3	-	1	1
2	Pasca Sarjana / S2	5	4	9
3	Sarjana / S1	16	27	43
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	1	8	9
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	3	2	5
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	Jumlah	25	42	67

**Sumber Data DKPUS sampai dengan 31 Januari 2022*

Gambar 2.4
Peta Jabatan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering Tahun 2022

No	Eselonering	Jabatan		Jumlah
		Terisi	Kosong	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	11	-	11
4	Fungsional Tertentu	33	35	68
5	Fungsional Umum	17	21	38
	Jumlah	67	56	123

**Sumber Data DKPUS sampai dengan 31 Januari 2022*

2.3 Kinerja Pelayanan DKPUS

Dalam rangka mewujudkan Kearsipan Dan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “ *Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul Di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien Dan Cepat Berbasis Teknologi* ”.

Pada 10 (Sepuluh) tahun terakhir setelah terbentuknya DKPUS, umumnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus mengalami perbaikan di seluruh aspek. Beberapa indikator dalam penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah terkait dengan kualitas penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan tersebut adalah :

- a. Indikator dalam mendukung RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
- b. Indikator dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.



**Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018 - 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA PD TAHUN KE					RASIO CAPAIAN RENSTRA PADA TAHUN KE				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai LAKIP DKPUS				3	3	3	3	3	4	-	-	-	-	133,33	-	-	-	-
	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DKPUS				75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (Orang)				59	60	60	60	60	59	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (Orang)				59	60	60	60	60	59	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)				10	60	60	60	60	10	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Laporan)				5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	100	-	-	-	-



Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)				2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (Orang)				59	60	60	60	60	59	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah bantuan sarana dan prasarana kearsipan untuk desa/kel (Kab/Kota)				0	0	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta (Orang)				0	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan				1015	1020	1030	1040	1050	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka				200	350	400	500	550	308	-	-	-	-	154	-	-	-	-
Pertambahan pengunjung perpustakaan				10000	11500	12500	13650	14870	8131	-	-	-	-	81,31	-	-	-	-
Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah (Dokumen)				2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan dikelola (Bahan Pustaka)				430	500	500	600	650	445	-	-	-	-	103,4884	-	-	-	-
Jumlah koleksi hasil terbitan daerah yang terkumpul berupa karya cetak dan karya rekam (terbitan)				140	140	160	160	175	115	-	-	-	-	82,14286	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

jumlah judul Koleksi Bahan Pustaka perpustakaan prov (judul)				0	200	250	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta (orang)				0	0	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang peraturan-peraturan serah simpan (orang)				50	50	0	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Terbitan (eksemplar)				0	3.000	4.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Sekolah yang menerima bantuan penyediaan bahan pustaka (Sekolah)				0	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat (Kabupaten)				5	5	5	5	5	2624	-	-	-	-	52480	-	-	-	-
Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum (Orang)				1.500	9.000	10.000	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah informasi yang tersedia dalam website (Informasi)				200	250	250	250	250	56	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Jumlah pengunjung pameran dan bedah buku (Orang)				3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah (orang)				260	1.060	1.200	1.250	1.300	281	-	-	-	-	108,0769	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jumlah Sekolah (Sekolah)				1.015	1.020	1.030	1.040	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (buah)				0	82	107	107	1.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
presentase perpustakaan terakreditasi				18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	4	-	-	-	-	22,0022	-	-	-	-
Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar				40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (Orang)				0	10	15	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pustakawan/pengelola perpustakaan yang memahami sertifikasi dan uji kompetensi (Orang)				0	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta rapat kerja wadah/forum kepustakawana (Orang)				0	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi (Orang)				10	15	20	20	30	15	-	-	-	-	150	-	-	-	-
Jumlah DUPAK pustakawan dan calon pustakawan (DUPAK)				20	25	30	30	40	22	-	-	-	-	110	-	-	-	-
jumlah pustakawan yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan jabatan (Orang)				0	10	15	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta seminar kepustakawanan (Orang)				0	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jumlah pustakawan/pengelola perpustakaan yang memahami sertifikasi dan uji kompetensi (Orang)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perpustakaan sekolah yang memperoleh NPP (Perpustakaan)	21	42	42	42	42	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Lomba (Perpustakaan)	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah perpustakaan yang dibina (Perpustakaan)	21	42	42	42	42	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
jumlah informasi 50 profil perpustakaan se-Prov Kep Bangka Belitung (Buku)	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (orang)	80	550	550	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah peraturan daerah tentang perpustakaan (Perda dan Pergub)	0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi (Perpustakaan)	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	20	20	20	20	46	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta bimtek (Orang)	65	115	115	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Peserta Lomba pengelolaan Kearsipan (orang)	21	0	0	0	0	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PAK/SKP yang dinilai (SKP)	80	80	80	90	90	80	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan (Perangkat Daerah)				40	0	0	0	0	40	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip (Desa/Kel)				35	42	42	42	42	35	-	-	-	-	100	-	-	-	-
jumlah peraturan daerah tentang kearsipan (Peraturan)				0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat provinsi dan Lomba pengelolaan kearsipan (Orang)				0	56	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan kearsipan (orang)				0	0	150	0	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan dan Jumlah SMA/SMK dan SLB (SMA/SMK dan SLB), Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung yang dibina (Perangkat Daerah)				0	68	75	80	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)				38	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi (orang)				30	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Persentase pengawasan kearsipan di Ormas, Perusahaan, BUMD dan parpol (kab/kota) dan jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)				0	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah SMA/SMK dan SLB yang dibina (SMA/SMK dan SLB)				28	0	0	0	0	28	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)				290	350	378	405	432	320	-	-	-	-	110,3448	-	-	-	-
Jumlah arsip yang dipelihara provinsi (arsip)				200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	100	-	-	-	-
jumlah arsip vital yang terdata di LKD kab/kota (arsip vital)				400	401	450	500	500	401					100,25				
jumlah arsip asset yang terdata di 7 kab/kota (Arsip)				0	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah arsip terjaga (arsip)				40	45	50	55	60	117	-	-	-	-	292,5	-	-	-	-
Jumlah arsip kacau yang terdata di 6 perangkat daerah (Arsip)				40	50	60	70	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah LKD di kab/kota (LKD Kab/Kota)				7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Jumlah pengunjung pameran (Pengunjung)				700	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah LKD kab/kota yang didampingi (Arsip)				12	7	7	7	7	20	-	-	-	-	166,6667	-	-	-	-



	Jumlah PD yang terdaftar elektronik arsip (Perangkat Daerah)				0	40	40	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung (Buku)				251	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung (Dokumen)				16	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan / pengelolaan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Arsip Inaktif)				44	44	44	44	44	5	-	-	-	-	11,36364	-	-	-	-

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN RENSTRA PD TAHUN KE					RASIO CAPAIAN RENSTRA PADA TAHUN KE				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (Orang)	1.929.329.840	2.321.101.419	2.437.156.490	2.559.014.314	2.686.965.030	1.798.728.985	-	-	-	-	93,23	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (Orang)	343.161.000	81.164.847.000	85.008.089.350	89.153.493.818	93.611.168.508	129.777.563	-	-	-	-	37,82	-	-	-	-
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)	29.000.000	102.427.500	107.548.875	112.926.319	118.572.635	9.975.291	-	-	-	-	34,40	-	-	-	-
4	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Laporan)	62.013.700	110.980.000	140.980.000	170.980.000	200.980.000	41.185.100	-	-	-	-	66,41	-	-	-	-
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	27.800.000	198.255.750	208.168.538	218.576.964	229.505.813	25.231.650	-	-	-	-	90,76	-	-	-	-
6	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (Orang)	90.860.000	102.600.000	106.500.000	113.000.000	119.500.000	88.600.000	-	-	-	-	97,51	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana kearsipan untuk desa/kel (Kab/Kota)	0	0	0	350.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rapat Koordinasi Pengembangan Kearsipan dan perpustakaan Daerah	Jumlah peserta (Orang)	0	250.000.000	270.000.000	300.000.000	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah (Dokumen)	52.527.500	120.000.000	145.000.000	160.000.000	200.000.000	39.504.510	-	-	-	-	75,21	-	-	-	-
10	Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan terkelola (Bahan Pustaka)	28.580.000	100.000.000	125.000.000	135.000.000	150.000.000	20.584.000	-	-	-	-	72,02	-	-	-	-
11	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Jumlah koleksi hasil terbitan daerah yang terkumpul berupa karya cetak dan karya rekam (terbitan)	37.544.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	100.000.000	32.762.000	-	-	-	-	87,26	-	-	-	-
12	Penyediaan Bahan Pustaka	jumlah judul Koleksi Bahan Pustaka perpustakaan prov (judul)	0	126.000.000	150.000.000	250.000.000	270.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Workshop Pembuatan Resensi Buku	Jumlah peserta (orang)	0	0	167.350.000	0	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

14	Sosialisasi peraturan-peraturan tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang peraturan-peraturan serah simpan (orang)	0	75.000.000	0	122.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penerbitan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah Terbitan (eksemplar)	0	245.000.000	357.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Penyediaan Buku Bacaan pada Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima bantuan penyediaan bahan pustaka (Sekolah)	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat (Kabupaten)	117.547.400	400.000.000	450.000.000	480.000.000	550.000.000	72.732.349	-	-	-	-	61,87	-	-	-	-
18	Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum (Orang)	0	350.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kegiatan Pengelolaan Layanan Website	Jumlah informasi yang tersedia dalam website (Informasi)	32.678.000	70.000.000	75.000.000	90.000.000	90.000.000	27.514.700	-	-	-	-	84,20	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

20	Kegiatan Pameran Buku	Jumlah pengunjung pameran dan bedah buku (Orang)	0	600.000.000	700.000.000	700.000.000	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah (orang)	311.441.000	528.750.000	600.000.000	650.000.000	675.000.000	279.450.315	-	-	-	-	89,73	-	-	-	-
22	Penyediaan Buku Bacaan untuk Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah (Sekolah)	0	500.000.000	600.000.000	700.000.000	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pengembangan dan Pengumpulan Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (buah)	0	177.450.000	186.322.500	195.638.625	580.020.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (Orang)	0	165.000.000	225.000.000	225.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pustakawan/Pengelola Perpustakaan	Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (Orang)	0	180.000.000	210.000.000	245.000.000	265.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

26	Rapat Kerja Forum/Organisasi Pustakawan	Jumlah peserta rapat kerja wadah/forum kepastakawana (Orang)	0	180.000.000	210.000.000	245.000.000	265.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi (Orang)	67.699.100	100.000.000	120.000.000	150.000.000	170.000.000	37.571.600	-	-	-	-	55,50	-	-	-	-
28	Penilaian Angka Kredit Pustakawan	Jumlah DUPAK pustakawan dan calon pustakawan (DUPAK)	22.623.100	40.000.000	52.000.000	68.000.000	98.000.000	19.198.250	-	-	-	-	84,86	-	-	-	-
29	Kegiatan Pelaksanaan Sertikasi dan Uji Kompetensi bagi Pustakawan	jumlah pustakawan yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan jabatan (Orang)	0	95.000.000	120.000.000	135.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Seminar Kepustakawanan	Jumlah peserta seminar kepastakawanan (Orang)	0	210.000.000	250.000.000	265.000.000	285.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sosialisasi Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pustakawan/Pengelola Perpustakaan	Jumlah pustakawan/peng elola perpustakaan yng memahami sertifikasi dan uji kompetensi (Orang)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kegiatan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov. Kep. Babel	Jumlah Perpustakaan sekolah yang memperoleh NPP (Perpustakaan)	33.827.000	70.875.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	22.360.600	-	-	-	-	66,10	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

33	Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Lomba (Perpustakaan)	92.881.540	183.750.000	192.937.500	202.584.375	212.713.594	76.657.000	-	-	-	-	82,53	-	-	-	-
34	Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibina (Perpustakaan)	47.191.700	107.100.000	112.455.000	118.077.750	123.981.638	35.239.690	-	-	-	-	74,67	-	-	-	-
35	Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan se- Prov. Kep. Bangka Belitung	jumlah informasi 50 profil perpustakaan se- Prov Kep Bangka Belitung (Buku)	0	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (orang)	0	1.950.000.000	2.125.000.000	2.340.000.000	2.570.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan	jumlah peraturan daerah tentang perpustakaan (Perda dan Pergub)	0	600.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kegiatan Akreditasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi (Perpustakaan)	96.362.700	115.000.000	125.000.000	150.000.000	180.000.000	43.734.600	-	-	-	-	45,39	-	-	-	-
39	Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	Jumlah peserta bimtek (Orang)	0	236.500.000	260.150.000	286.165.000	314.781.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

40	Lomba pengelolaan Kearsipan desa/kel, Perangkat Daerah, LKD kab/kota	Jumlah Peserta Lomba pengelolaan Kearsipan (orang)	81.302.500	0	0	0	0	67.365.800	-	-	-	-	82,86	-	-	-	-
41	Penilaian Angka Kredit Arsiparis	Jumlah PAK/SKP yang dinilai (SKP)	53.600.000	110.396.000	121.435.600	133.579.160	146.937.076	41.389.670	-	-	-	-	77,22	-	-	-	-
42	Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan (Perangkat Daerah)	117.325.000	0	0	0	0	99.053.978	-	-	-	-	84,43	-	-	-	-
43	Arsip Masuk Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip (Desa/Kel)	121.792.500	302.736.000	317.872.800	333.766.440	350.454.762	107.469.510	-	-	-	-	88,24	-	-	-	-
44	Revisi Peraturan daerah tentang Kearsipan	jumlah peraturan daerah tentang kearsipan (Peraturan)	0	400.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat provinsi dan Lomba pengelolaan kearsipan (Orang)	0	147.000.000	234.517.350	254.110.335	275.469.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Sosialisasi peraturan kearsipan	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan kearsipan (orang)	0	0	165.000.000	0	181.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

47	Pembinaan kearsipan di pemerintah prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan dan Jumlah SMA/SMK dan SLB (SMA/SMK dan SLB), Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung yang dibina (Perangkat Daerah)	0	388.937.000	418.383.850	448.303.000	468.718.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pengawasan kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung SMA/SMK dan SLB	jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Lomba arsiparis teladan Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

50	Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	Persentase pengawasan kearsipan di Ormas, Perusahaan, BUMD dan parpol (kab/kota) dan jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)	0	323.568.300	346.346.700	370.924.000	397.456.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pembinaan kearsipan di SMA/SMK dan SLB Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah SMA/SMK dan SLB yang dibina (SMA/SMK dan SLB)	113.083.500	0	0	0	0	106.132.010	-	-	-	-	93,85	-	-	-	-
52	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip yang dipelihara provinsi (arsip)	9.403.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	9.103.000	-	-	-	-	96,81	-	-	-	-
53	Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/kota Provinsi kep. Bangka Belitung	jumlah arsip vital yang terdata di LKD kab/kota (arsip vital)	66.024.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	59.030.000	-	-	-	-	89,41	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

54	Pengelolaan dan pendataan arsip asset di 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel	jumlah arsip asset yang terdata di 7 kab/kota (Arsip)	0	250.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Provinsi kep. Bangka Belitung	Jumlah arsip terjaga (arsip)	31.025.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000	26.000.000	-	-	-	-	83,80	-	-	-	-
56	Pengelolaan arsip kacau di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi kep. Bangka Belitung	Jumlah arsip kacau yang terdata di 6 perangkat daerah (Arsip)	0	90.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	jumlah LKD di kab/kota (LKD Kab/Kota)	110.697.400	250.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000	100.375.000	-	-	-	-	90,68	-	-	-	-
58	Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pengunjung pameran (Pengunjung)	0	367.500.000	385.875.000	405.168.750	425.427.188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota	Jumlah LKD kab/kota yang didampingi (Arsip)	41.416.000	135.000.000	141.750.000	148.837.500	156.279.375	29.259.200	-	-	-	-	70,65	-	-	-	-
60	Penerapan E-Arsip	Jumlah PD yang terdaftar elektronik arsip (Perangkat Daerah)	0	500.000.000	250.000.000	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

61	Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung (Buku)															
		Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung (Dokumen)	0	0	125.000.000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
62	Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendataan / pengelolaan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Arsip Inaktif)	32.322.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	25.092.000	-	-	-	-	77,63	-	-	-	-

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKPUS.

Tantangan

Tantangan yang ada adalah rendahnya sumber daya manusia petugas kearsipan dalam pengelolaan kearsipan dan masih kurangnya anggaran dalam penyediaan sarana kearsipan dan kurang representatifnya ruangan arsip dikarenakan belum adanya depo arsip.

Selanjutnya tantangan dalam bidang pelayanan yaitu kurangnya petugas pelayanan perpustakaan dan kurangnya pustakawan. serta petugas dalam pengolahan perpustakaan serta belum adanya gedung adanya gedung kantor yang sekaligus bisa dijadikan sebagai tempat layanan perpustakaan. Tantangan berikutnya adalah kurangnya fasilitas dan prasarana pada perpustakaan di desa/kelurahan, PD, sekolah seperti belum sepenuhnya maksimal gedung, rak buku, meja dan kursi baca, kurangnya petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang pengelolaan perpustakaan.

Dalam pengembangan perpustakaan dan arsip daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:

- Memberikan pengertian kepada masyarakat akan peran dan fungsi perpustakaan dan arsip sebagai sarana informasi;
- Membuat regulasi untuk menguatkan fungsi dari perpustakaan dan kearsipan;
- Mengembangkan perpustakaan yang ada di desa-desa. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memfasilitasi wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki layanan perpustakaan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Peluang :

Dalam pelaksanaan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peluang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian perpustakaan dan arsip;
- Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan;
- Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik;
- Keberadaan dan perkembangan perpustakaan PD, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah;
- Rendahnya kualitas hidup masyarakat;
- Rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- Adanya kesempatan pustakawan dan arsiparis untuk bermitra kerja dengan jabatan fungsional lainnya;
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable;
- Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi masalah dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang berkaitan dengan bidang aparatur. antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip organisasi yang efisien dan rasional. sehingga struktur organisasi kurang proporsional. sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas. kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.

Demikian pula halnya terkait dengan pelayanan publik, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat, belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang diinginkan belum dapat diwujudkan, tetapi secara bertahap kekurangan-kekurangan yang ada akan terus dilakukan untuk mencapai penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga pada kesempatan mendatang harapan tersebut dapat diwujudkan pada waktunya.

Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sangat berkaitan erat dengan isu-isu strategis yang merupakan permasalahan inti yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki implikasi jangka panjang

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Belum tersedianya gedung, sarana dan prasarana perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital;
- c. Kualitas SDM dan Pelayanan Kearsipan yang masih rendah;
- d. Penyelenggaraan kearsipan yang masih belum standarisasi;
- e. Kompetensi Pengelola Perpustakaan yang masih terbatas;
- f. Masih kurangnya bahan pustaka;
- g. Ketersediaan layanan Perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi belum memadai;
- h. Masih rendahnya sarana dan prasarana;
- i. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip Vital ;
- j. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip asset;
- k. Masih rendahnya kesadaran tentang arsip terjaga ;
- l. Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan ;
- m. Masih rendahnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan arsip dinamis di 7 (tujuh) Kab/Kota Prov. Kep. Babel ;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya Sarana Dan Prasarana	Belum Ada Gedung Yang Memadai	1) Kurangnya Dana 2) Belum Ada Lahan Untuk Pembangunan Gedung
2	Masih Rendahnya Penataan Arsip Yang	1) Tidak Ada Penerimaan	1. Kurangnya Jumlah SDM

	Sesuai Dengan Standar Kearsipan	SDM 2) Penempatan SDM Tidak Sesuai Dengan Pendidikan	2. Kurangnya Kompetensi SDM
3	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Pentingnya Pelestarian Arsip	1) Masih Banyak Lembaga Kearsipan Yang Belum Mengelola Arsip Dengan Baik	1. Kurangnya Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
4	Kurangnya Minat Baca Masyarakat	1. Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka 2. Kurangnya Kualitas Layanan	1. Belum Ada Gedung Perpustakaan Yang Memadai 2. Kurangnya Dana 3. Kurangnya Kualitas SDM Perpustakaan

3.2. Telahaan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah desain pembangunan yang di rancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah ***“Babel Sejahtera. Provinsi Maju Yang Unggul Di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien Dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

MISI :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan berdasarkan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ada 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi;
6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi yang ke 5 (lima) yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi**”. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan meningkatkan derajat kualitas layanan publik. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dan kota dalam bidang perpustakaan, arsip dan sosial lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

Sesuai dengan misi tersebut maka Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berupa kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi

perpustakaan dan kearsipan didalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra DKPUS Prov.Kep.Bangka Belitung.

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020 – 2024

1. Visi :

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020- 2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Melalui Penguatan Budaya Literasi”.

2. Misi_:

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan p embangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, yaitu: **“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan**

meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

3) Program dan Kegiatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

- a. Program Perpustakaan dan Literasi, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan;
 3. Pembinaan Pustakawan;
 4. Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan;
 5. Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 6. Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 7. Pengelolaan Data dan Informasi;
 8. Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan;
 9. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus;
 10. Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
 11. Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi;
 12. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
 13. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
- b. Program Dukungan Manajemen dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional;

2. Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional;
4. Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional;
5. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan
6. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024)

1) Visi

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

2) Misi

- Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sasaran Strategis ANRI 2020-2024

1. “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan.

2. “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.
3. “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
4. “Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

4) Program dan Kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 -2024

a. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
- Pembinaan Kearsipan lingkup pusat
- Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah timur
- Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah barat
- Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan
- Pelayanan Jasa Kearsipan
- Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kearsipan
- Pengawasan dan akreditasi kearsipan
- Akuisisi arsip nasional
- Pengolahan arsip nasional
- Preservasi arsip nasional
- Pengelolaan arsip tsunami dan arsip statis di daerah
- Pelayanan dan pemanfaatan arsip
- Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan
- Pengelolaan data dan informasi kearsipan

b. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI

Dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum dengan
- Pelayanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan
- Pelayanan umum
- Pengawasan internal

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ bujur timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ lintang selatan dengan luas mana wilayah $81.725.14 \text{ KM}^2$ yang terdiri dari luas daratan $\pm 16.424.14 \text{ KM}^2$ dan luas lautan $\pm 65.301 \text{ KM}^2$. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka. dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 1 Kota dan 6 Kabupaten dengan jumlah kecamatan adalah sebanyak 47 Kecamatan. Jumlah kelurahan adalah sebanyak 78 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 309 desa.

Jumlah sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.406 sekolah dengan rincian 75% berstatus negeri dan 25% berstatus sekolah swasta. Sedangkan jumlah siswa yang terdata berjumlah 261.934 siswa dengan persentase 84% di negeri dan 16% di sekolah swasta. Sekolah Dasar yang ada sebanyak 784 sekolah.

Sekolah-sekolah tersebut telah memiliki perpustakaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 10 yaitu Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mana diberikan tugas melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan yang ada di desa/kelurahan. SD. SMP. SMA/SMK negeri/swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan sekolah dilakukan dengan menysasar ke desa/kelurahan dengan pola pembinaan pengolahan bahan pustaka. peningkatan sumber



daya manusia melalui bimtek. peningkatan bantuan bahan pustaka. peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu juga dilakukan perpustakaan keliling ke desa/kelurahan maupun sekolah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 22 (5) dengan menggunakan 3 unit mobil Pelayanan Perpustakaan Keliling bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Di bidang kearsipan juga melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta lomba pengelolaan kearsipan di tingkat PD. desa/kelurahan. LKD kabupaten/kota. Selain itu untuk peningkatan sumber daya pengelola kearsipan juga dilakukan bimtek bagi pengelola arsip di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Maka dapat diidentifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Kearsipan Dan Perpustakaan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Masih Kurangnya Pertumbuhan Minat Baca Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Masih Kurangnya Pelestarian Fisik Dan Penambahan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3. Masih Kurangnya Upaya Berkas Arsip yang Di Selamatkan
4. Minimnya Lembaga yang Menerapkan Kearsipan Secara Baku

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), tentunya harus disikapi dengan berbagai faktor yang dapat mendukung terhadap penetapan kebijakan yang ada. Mengingat untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan kesepahaman dan sinergitas dari berbagai elemen, yakni tidak saja dalam lingkungan internal akan tetapi eksternal juga turut berperan dalam membantu pencapaiannya, dimana prosesnya merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik demi terwujudnya *good governance*.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrase, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik. Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan

pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus (*in special formats*). Perbedaannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai *information product*, yakni informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan mengelola informasi terutama *information by product*, yakni informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi.

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa ” perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan tujuan kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah:

1. Untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
7. Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, dan

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien. Serta melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya

Dalam mengaplikasikan stratejik manajemen di sektor publik. hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan. baik lingkungan internal maupun eksternal yang merupakan kegiatan yang sangat vital. bahkan dapat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi.

Lingkungan eksternal bagi kegiatan di sektor publik tidak jauh berbeda dengan lingkungan eksternal yang terjadi di sektor bisnis. yang membedakannya hanyalah bahwa di sektor bisnis yang berorientasi pada *profit*/keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga perlu memperhatikan lingkungan eksternal untuk organisasi pesaingnya. sedangkan didalam sektor publik harus memperhatikan lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan. karena organisasi di sektor publik merupakan organisasi tanpa saingan dan pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas bukan pada organisasi pesaing. Jadi lingkungan eksternal bagi kegiatan di sektor publik adalah masyarakat luas dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sehingga para pengambil keputusan dapat memberikan pelayanan/kepuasan bagi masyarakat luas dan memberikan hasil yang lebih baik.

Untuk menjaga agar organisasi tetap eksis. maka organisasi tersebut harus melakukan kegiatan ***"Echological Niche."*** yaitu suatu kondisi dimana prinsip-prinsip manajemen dalam hal ini penyediaan ***the six M*** yaitu *man.machine.materials.money.markets* dan *method* sudah bekerja secara harmonis artinya *echological niche* akan terjadi. andaikata lingkungan beranggapan bahwa sistem-sistem tersebut bekerja dengan baik/mapan yang didukung oleh lingkungan

yang berkepentingan atau lingkungan yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi sistem.

Dampak yang ditimbulkan apabila organisasi publik tidak memperhatikan *ecological niche* adalah terjadinya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip manajemen. karena tidak saling mendukung yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi malah tidak menutup kemungkinan akan menghancurkan atau mematikan organisasi tersebut.

Analisis yang digunakan dalam manajemen stratejik adalah (*Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats*) yang dikenal dengan sebutan **SWOT Analysis** atau analisis mengenai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan.

Selanjutnya analysis SWOT atau analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Dukungan regulasi yang telah menetapkan kearsipan dan perpustakaan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait kearsipan dan perpustakaan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di daerah.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya fungsional arsip dan pustakawan.



- 2) Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola arsip dan perpustakaan dalam mengembangkan kearsipan dan perpustakaan.
 - 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat
 - 4) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan dan perpustakaan.
2. Lingkungan eksternal
- a. Peluang (Opportunity)
 1. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip dan perpustakaan ;
 2. Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan
 3. Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata. baik secara manual maupun elektronik.
 - b. Ancaman (Threat)
 - 1) Berkurangnya minat berkunjung karena keterbatasan ragam bacaan dan keterbatasan;
 - 2) Minimnya kerja sama dengan institusi atau lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan dan mempeluas jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
 - 3) Perkembangan teknologi akan mengurangi peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika tidak segera menyesuaikan diri.

Dari pemaparan *SWOT Analysis* di atas. maka dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi organisasi serta Strategi. yang meliputi program. dan kegiatan operasional dan Kebijakan. yang merupakan pedoman pelaksanaan bagi tindakan tertentu berdasarkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra). Disinilah pentingnya penyusunan rencana

strategis. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan Strategi dan kebijakan.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg PAN:2008). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Pada Renstra pertama tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi:

- a. Meningkatnya tata kelola arsip daerah yang baik ;
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat ;
- c. Meningkatnya kualitas layanan arsip dan perpustakaan ;
- d. Meningkatnya pengawasan kearsipan daerah yang komprehensif.

Sedangkan pada Perubahan Renstra sekarang, tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 lima tahun kedepan adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)

4.1.2 Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya ditentukan sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat



diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN:2008).

Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. sasaran (target) yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian diatas. maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan.triwulanan. paling lama satu tahun. Sasaran pertama yang ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2020 Untuk 3 Tahun Kebelakang :

1. Peningkatan Kualias Pengelolaan Arsip Daerah Yang Baik ;
2. Peningkatan Minat Dan Budaya Baca Bagi Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Arsip Dan Perpustakaan ;
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan.

Sedangkan pada Perubahan Renstra sekarang, sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021-2022 untuk Dua tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat;
2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku Kearsipan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)





Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Daerah Yang Komprehensif		Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan		Jumlah Pencipta Arsip Yang Mendapat Pengawasan		6	6	6		
2.	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Daerah Yang Baik		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Yang Baik		Persentase Arsip Dinamis Dan Statis Dalam Kondisi Baik/Layak		20	20	20		
3.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat		Peningkatan Minat Dan Budaya Baca Bagi Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Dan Informasi		Jumlah Buku Perpustakaan Sekolah		308	1.020	1.030		
					Jumlah			350	400		



					Koleksi Bahan Pustaka						
					Jumlah Kunjungan Di Perpustakaan						
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Arsip Dan Perpustakaan		Penigkatan Pelayanan Perpustakaan Dan Arsip		Indeks Kepuasan Masyarakat			20	20		
					Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Terakreditasi		4	4	4		
1.		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan				29,5	34,3
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat		Persentase Pertumbuhan Minat Baca Masyarakat				30,11	34,3



				Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Persentase Pelestarian Fisik Dan Penambahan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				50	50
2.		Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik				Indeks Lake				Baik	Baik
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase Berkas Arsip yang Di Selamatkan				3	3
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar Baku Kearsipan		Persentase Lembaga yang Menerapkan Kearsipan Secara Baku				Baik	Baik



3.		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)				Predikat Penilaian RB Perangkat Daerah (DKPUS)				BB	BB
				Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)		Nilai RB Perangkat Daerah (DKPUS)				73,40	73,42

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diperlukan strategi yang meliputi:

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah
- Meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kearsipan.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan daerah
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan provinsi

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah
- Penyelenggaraan pembinaan kepada sumber daya manusia perpustakaan sekolah

- c. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia kearsipan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang memenuhi standar
- f. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia perpustakaan
- g. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat	a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah	a. Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah
	2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan sekolah	b. Penyelenggaraan pembinaan kepada sumber daya manusia perpustakaan sekolah
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	c. Meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi	c. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	d. Meningkatkan kualitas sumber	d. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia kearsipan



3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)	Kearsipan sesuai Standar Baku Kearsipan 5. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)	daya manusia kearsipan. e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan daerah f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan provinsi	e. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang memenuhi standar f. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia perpustakaan g. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan
---	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib pada tahun 2017-2022 adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan perencanaan daerah lainnya.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program dan kegiatan yang disusun terdiri dari:

6.1. Program Strategis

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka Program-program perencanaan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2018-2020 sebelum Perubahan Renstra Perubahan adalah:

1. Program Peingkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
4. Program Peningkatn Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
5. Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip

Program-program perencanaan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023-2026 setelah Renstra Perubahan adalah :

2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan

2 23 03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

2 24 02 Program Pengelolaan Arsip

2 24 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

2 24 04 Program Perizinan Penggunaan Arsip

2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.2. Kegiatan Strategis

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 Terlihat Pada Gambar 6.1.A sebagai berikut :

Gambar 6.1. A
Kegiatan Strategis DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sebelum Renstra Perubahan Ke Dua 2018-2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
	Program Rutin (pendukung/generik):	
I.a	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan
a.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)
b.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)
c.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya
I.b.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah
e.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%
f.	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 85%
	Program Wajib (utama/teknis)	
Ii.	Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	
A.	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah Dan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen Bibliografi Induk Daerah Dan Katalog Induk Daerah

B.	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Jumlah Koleksi Hasil Terbitan Daerah
C.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat
D.	Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	Jumlah Peserta Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD, Lomba Bercerita Bahasa Daerah, Lomba Menulis Anak Untuk Anak Smp Dan Sma Dan Lomba Penulisan Cerita Rakyat Daerah
Iii.	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	
A.	Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Jumlah Pustakawan Teladan Tingkat Provinsi
B.	Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Mengikuti Lomba
C.	Akreditasi Perpustakaan Sekolah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Sudah Terakreditasi
D.	Peningkatan Kapasitas Sdm Perpustakaan	Jumlah Peserta Bimtek
Iv	Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	
A.	Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan	Jumlah peserta bimtek kearsipan OPD Provinsi, Jumlah peserta bimtek kearsipan SMA, SMK dan SLB Provinsi
B.	Arsip Masuk Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan layanan sadar arsip
C.	Lomba Kearsipan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta lomba arsiparis teladan tingkat provinsi, jumlah peserta lomba pengelolaan arsip tingkat LKD Kab/kota OPD Kab/Kota dan Desa/Kelurahan
D.	Pengawasan Kearsipan Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah OPD Provinsi Kep.Babel yang diawasi

V	Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	
A.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah yang dipelihara provinsi
B.	Pemdampingan Pengelolaan Arsip Dinamis Di Kab/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola di 7 Kab/Kota
C.	Pameran Arsip Statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pengunjung pameran
D.	Penelusuran Sejarah Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung

Gambar 6.1.B
Kegiatan Strategis DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Setelah Renstra Perubahan 2023-2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
	Program Rutin (pendukung/generik):	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Renstra/Renja PD
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD Formula
		Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Internal



1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Dan Pengelola Adminitrasi Keuangan
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan kepegawaian
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fake, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan Dan Perundang Undangan Yang Tersedia Jumlah Tenaga Sopor
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Dan Minum Tamu Yang Tersedia
1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim Jumlah Materai Yang Disediakan



1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, Internet, TV Kkabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan/Satpam, Pramubakti, Supir Dan Tenaga Kebersihan Kantor Yang Diperkerjakan
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Di Pelihara
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler Yang Di Pelihara
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Di Pelihara
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara
	Program Wajib (utama/teknis)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentasi Perpustakaan Yang Di Bina
		Persentasi Perpustakaan yang dikembangkan
2.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
		Jumlah perpustakaan yang dibina
		Jumlah Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
2.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service



2.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus
2.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3.1	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah Dan Bibliografi Daerah
3.1.1	Sub Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan
3.1.2	Sub Kegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan
3.2	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno
3.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran	Jumlah Masyarakat yang Berperan



	serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno
3.3	Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2.3.1	Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan
4.1.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Unit Kearsipan dan Unit Pengolah yang mengelola arsip dinamis yang sesuai standar baku kearsipan
		Persentase jumlah arsip yang dipelihara dan dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sesuai standar baku kearsipan
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diawasi
4.1.1	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan
4.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
4.2.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis Yang Otentik Dan Di Percaya Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa
		Jumlah Daftar Arsip Statis yang di Akusisi dan dikelola



		Jumlah Daftar Arsip Statis yang dilakukan Preservasi dan dikelola
		Jumlah pengguna yang dapat mengakses arsip statis
4.2.1	Sub Kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI
4.2.2	Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses
4.3.	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang dikelola menggunakan simpul jaringan dalam SIKN Daerah Provinsi
		Persentase layanan arsip dinamis yang menggunakan simpul jaringan
		Persentase Perangkat Daerah / UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB BUMD, Ormas dan Parpol yang dibina terkait Pengelolaan Arsip Dinamis
4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi
4.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan
5.1.	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Peningkatan Unit Kearsipan PD yang mendapatkan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan terkait Pemusnahan Berkas Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
		Jumlah Lembaga Pencipta Arsip yang mendapatkan sosialisasi terkait pemusnahan
		Jumlah Daftar Arsip Usul Musnah



		Jumlah Daftar Arsip yang telah ditetapkan musnah
5.1.1	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	
5.2.	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkas Arsip PD Provinsi Yang digabung/Bubar
		Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi terkait penyelamatan arsip OPD yang digabung dan atau dibubarkan
		Jumlah Daftar Arsip yang diselamatkan dari OPD yang digabung dan/atau dibubarkan
		Jumlah Berita Acara penyerahan arsip OPD yang digabung dan/atau dibubarkan
		Persentase Berkas Arsip Pemekaran Daerah Kab/Kota Yang Di Selamatkan
5.2.1	Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
5.3.	Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Daftar Arsip Statis Hasil Autentifikasi Arsip dan Arsip Hasil Alih Media Yang Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.3.1	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.3.2	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Pejaminan Keabsahan Arsip

VI	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
6.1.	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Persentase Berkas Perizinan Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Dilayani
		Jumlah pengguna arsip tertutup
6.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang disusun dan diterapkan
6.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup

6.3. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama adalah aparatur dan program/kegiatan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah.

Untuk menjelaskan indikator program dan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- a. Sasaran adalah Meningkatnya Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah Predikat (Nilai) SAKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b. Sasaran adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Internal (DKPUS).

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja adalah Persentasi Perpustakaan Yang Di Bina.

- Sasaran Meningkatnya Persentase Pembinaan Perpustakaan.

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

Indikator Kinerja adalah Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

- Sasaran Meningkatnya Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

4. Program Program Pengelolaan Arsip.

Indikator Kinerja adalah Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan.

- Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan.

5. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip.

Indikator Kinerja adalah Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan.

- Sasaran Meningkatnya Persentase Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan.

6. Program Perizinan dan Penggunaan Arsip.

Indikator Kinerja adalah Persentase Pengunjung penggunaan layanan arsip.

- Sasaran Meningkatnya Layanan Perizinan Penggunaan Arsip Yang Digunakan Sesuai Dengan Ketentuan.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator kinerja serta pendanaan indikatif DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah sebagaimana terlampir.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendekatan Kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan mengalokasikan sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perpektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dn program dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu Indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Prakiraan maju adalah penghitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan,

Bersifat indikatif bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Untuk dapat lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung RPJMD 2023-2026 dapat di lihat pada Tabel T-C.27 berikut dibawah ini



Tabel T-C.27.
Rencana Program. Kegiatan. dan Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PROGR AM	INDIKA TOR PROGR AM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIAT AN	INDIKA TOR KEGIAT AN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATA N	INDIKAT OR SUB KEGIAT AN	TARGET INDIKATOR SUB KEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUB KEGIATAN				BIDAN G URUSA N	
		20 23	20 24	20 25	20 26	2023	2024	2025	2026			202 3	202 4	202 5	202 6	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Pembi naan Perpus takaan	Persent asi Perpus takaan Yang di Bina	35 %	37 %	38 %	41 %	Rp1.79 9.000.0 00	Rp1.97 8.900.0 00	Rp2.17 6.790.0 00	Rp2.39 4.469.0 00	Kegiat an Pengel olaan Perpus takaan Tingkat Daerah Provin si	Persent ase Pening katan Pengel olaan Perpust akaan Tingkat Daerah Provins i	43	45	47	49	Rp1.10 5.000.0 00	Rp1.21 5.500.0 00	Rp1.33 7.050.0 00	Rp1.47 0.755.0 00	Pengem bangan dan Pemelih araan Layanan Perpusta kaan Elektroni k	Jumlah perpust akaan elektron ik yang dipeliha ra dengan Manaje men Layanan TIK Berbasis ISO2000 0 (ITSM : Informa tion Technol ogy Service	1	1	1	1	Rp210. 000.00 0	Rp231. 000.00 0	Rp254. 100.00 0	Rp279. 510.00 0	URUSA N PERPU STAKA AN	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

	Persentasi Perpustakaan yang dikembangkan	40 %	41 %	42 %	43 %														Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	200	200	200	200	Rp310.000.000	Rp341.000.000	Rp375.100.000	Rp412.610.000	
											Jumlah perpustakaan yang dibangun								Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	33	33	33	33	Rp300.000.000	Rp330.000.000	Rp363.000.000	Rp399.300.000	

82

83

																			Pengembangan Layanan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	54	54	54	55	Rp49.000.000	Rp53.900.000	Rp59.290.000	Rp65.219.000		
																			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1	1	1	1	Rp110.000.000	Rp121.000.000	Rp133.100.000	Rp146.410.000		
Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno	5	5	5	5	Rp1.125.000.000	Rp1.347.500.000	Rp1.482.250.000	Rp1.630.475.000	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Induk Daerah	1	1	1	1	Rp125.000.000	Rp137.500.000	Rp151.250.000	Rp166.375.000	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1	1	1	1	Rp65.000.000	Rp71.500.000	Rp78.650.000	Rp86.515.000	URUSAN PERPUSTAKAAN
										Jumlah Katalog Induk Daerah yang terkatalog		1	1	1	1					Penerbitan Bibliografi Induk Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1	1	1	1	Rp60.000.000	Rp66.000.000	Rp72.600.000	Rp79.860.000	

85



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

										Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Didokumentasikan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp350.000.000	Rp385.000.000	Rp423.500.000	Rp465.850.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0	0	0	0	Rp350.000.000	Rp385.000.000	Rp423.500.000	Rp465.850.000	
Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Berkas Arsip Yang Dilindungi Dan Selama Waktu Sesuai Dengan Ketentuan	25 %	25 %	25 %	25 %	Rp629.050.000	Rp748.000.000	Rp822.800.000	Rp905.080.000	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Persentase Peningkatan Unit Kearsipan PD yang mendapatkan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan terkait Pemusnahan Berkas Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	25%	25%	25%	25%	Rp60.000.000	Rp66.000.000	Rp72.600.000	Rp79.860.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4000	4500	5000	5500	Rp60.000.000	Rp66.000.000	Rp72.600.000	Rp79.860.000	URUSAN KEARSIPAN

87

[illegible]

89

90

91

92



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standar Baku Kearsipan	20	20	20	20	Rp575.000.000	Rp632.500.000	Rp695.750.000	Rp765.325.000	1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Presentase Unit Kearsipan dan Unit Pengolahan yang mengelola arsip dinamis yang sesuai standar baku kearsipan	23, 33%	24, 17%	25, 83%	26, 67%	Rp200.000.000	Rp220.000.000	Rp242.000.000	Rp266.200.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	1.400	1.450	1.550	1.600	Rp30.000.000	Rp33.000.000	Rp36.300.000	Rp39.930.000	URUSAN KEARSIPAN
											Presentase jumlah arsip yang dipelihara dan dipindahkan dari Unit Pengolahan ke Unit Kearsipan sesuai standar baku kearsipan	18, 18%	22, 73%	27, 27%	31, 82%					Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusunan Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	400	500	600	700	Rp40.000.000	Rp44.000.000	Rp48.400.000	Rp53.240.000	
											Presentase Peringkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Kearsip	100 % (utk LKD) dan 8,5 7% (utk OP D Prov)	100 % (utk LKD) dan 14, 29% (utk OP D Prov)	100 % (utk LKD) dan 20% (utk OP D Prov)	100 % (utk LKD) dan 25, 71% (utk OP D Prov)					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah hasil laporan pengawasan arsip dinamis kewenangan Provinsi	10	12	14	16	Rp130.000.000	Rp143.000.000	Rp157.300.000	Rp173.030.000	

94

95



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

										Arsip Dinami s																				
Progra m Perizin an dan Pengu naan Arsip	Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	12 ,5 %	12 ,5 %	12 ,5 %	12 ,5 %	Rp45.0 00.000	Rp49.5 00.000	Rp54.4 50.000	Rp59.8 95.000	1. Pelayan an Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	jumlah pengguna layanan izin arsip yang bersifat tertutup	0	10	10	10	Rp45.0 00.000	Rp49.5 00.000	Rp54.4 50.000	Rp59.8 95.000	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	0	1	1	1	Rp 0	Rp44.0 00.000	Rp48.4 00.000	Rp53.2 40.000	
																				Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	1	1	1	Rp 0	Rp5.50 0.000	Rp6.05 0.000	Rp6.65 5.000	
PROGR AM PENUN JANG URUSAN PEMER INTAHAN DAERAH PROVINSI	Predik t (Nilai) SAKIP Perang kat Daerah					Rp 18.547. 237.63 8	Rp 14.431. 610.86 2	Rp 15.750. 361.94 8	Rp 17.200. 988.14 3	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 170.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 205.70 0.000	Rp 210.00 0.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD Formula	10 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	Rp 80.000 .000	Rp 110.00 0.000	Rp 115.80 0.000	Rp 115.48 0.000	URUSAN PERPUSTAKA AN

97

																					Disediak an												
																					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	Rp 60.565 .319	Rp 66.621 .851	Rp 73.284 .036	Rp 80.612 .440			
																					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Rp 27.488 .752	Rp 30.237 .627	Rp 33.261 .390	Rp 36.587 .529			
																					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan daan	jumlah barang cetak	50 ekse mpla r	50 ekse mpla r	50 ekse mpla r	50 ekse mpla r	Rp 168.63 2.455	Rp 185.49 5.701	Rp 204.04 5.271	Rp 224.44 9.798			
																					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng- undanga n	Jumlah bahan bacaan dan perunda ng- undang an yang tersedia	850 ekse mpla r	850 ekse mpla r	850 ekse mpla r	850 ekse mpla r	Rp 11.209 .000	Rp 12.329 .900	Rp 13.562 .890	Rp 14.919 .179			
																					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	jumlah jenis ATK yang dibeli	165 lemb ar	165 lemb ar	165 lemb ar	165 lemb ar	Rp 143.30 4.370	Rp 157.63 4.807	Rp 173.39 8.288	Rp 190.73 8.116			
																					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjung an Tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia	1000 pax	1000 pax	1000 pax	1000 pax	Rp 63.811 .000	Rp 70.192 .100	Rp 77.211 .310	Rp 84.932 .441			

99

100

101





B A B VII

KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Proses penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan informasi dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama DKPUS sebagai koordinator dalam Kearsipan Dan Perpustakaan daerah, maka dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, DKPUS melakukan evaluasi dan pemantauan serta ikut dalam pelaksanaan penanggulangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai koordinator Kearsipan Dan Perpustakaan.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah :

Gambar 7.1 Indikator Tujuan, Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i> (Indikator Tujuan)		AA					AA
2	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i> (Indikator Sasaran)		BB					AA

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
			Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan (TUJUAN RENSTRA)	N/A	34,3					
	1.1	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan Provinsi (SASARAN RENSTRA)	N/A	34,3					
	1.1 .1	Persentasi Perpustakaan Yang Di Bina (Outcome)	N/A	34,02					
	1.1 .1. 1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Output)	N/A	42,5					
	1.1 .1. 2	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Output)	N/A	37,21					
	1.2	Persentase Pelestarian Fisik Dan Penambahan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (SASARAN RENSTRA)	N/A	50					
	1.2 .1	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (Outcome)	N/A	2					



	1.2 .1. 1	Jumlah Katalog Induk Daerah Dan Bibliografi Daerah (Output)	N/A	2 Dokumen Buku (1 Katalog dan 1 Buku Bibliografi)					
	1.2 .1. 2	Jumlah Naskah Kuno (Output)	N/A	6					
	1.2 .1. 3	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	N/A	2					
2	2	Indeks Lake (TUJUAN RENSTRA)	N/A	Sangat Baik					
	2.1	Persentase Berkas Arsip yang Di Selamatkan (SASARAN RENSTRA)	N/A	3					
	2.1 .1	Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan (Outcome)	N/A	2,5					
	2.1 .1. 1	Persentase Peningkatan Unit Kearsipan PD dan LKD Yang Melakukan Pemusnahan Berkas Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun (Output)	N/A	3					
	2.1 .1. 2	Persentase Berkas Arsip PD Provinsi Yang digabung/Bubar Yang Di Selamatkan (Output)	N/A	25					
	2.1 .1. 3	Persentase Berkas Arsip Statis Hasil Autentifikasi Arsip Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Output)	N/A	40					
	2.2	Persentase Lembaga yang Menerapkan Kearsipan Secara Baku (SASARAN RENSTRA)	N/A	Baik					



	2.2 .1	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan (Outcome)	N/A	20					
	2.2 .1. 1	Persentase PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD Yang Mengelola Arsip Dinamis Yang Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan Dan Berbasis TIK (Output)	N/A	20					
	2.1 .2. 1.1	Persentase Layanan Arsip Statis Yang Autentik Dan Di Percaya Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa (Output)	N/A	20					
	2.1 .3	Persentase PD Dan LKD Yang Mengelola Simpul Jaringan Dalam SIKN Daerah Provinsi (Output)	N/A	20					
	2.2 .2	Persentase Pengunjung penggunaan layanan arsip (Outcome)	N/A	20					
	2.2 .2. 1	Persentase Berkas Perizinan Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Dilayani	N/A	20					

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan acuan pedoman bagi segenap komponen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra yang merupakan rancangan pembangunan lima tahun ke depan, merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hasil dari penyelenggaraan Kearsipan Dan Perpustakaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha khususnya dan umumnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Strategis yang merupakan rancangan pembangunan jangka panjang menengah yang merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan setiap tahunnya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan Perubahan Ke Dua-Perubahan Ke Dua lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan *feasible* dalam arti bisa dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur



dan acuan serta pedoman bagi segenap unsur jajaran Satuan Kerja dalam menentukan menyusun rencana kerja tahunan, langkah-langkah kegiatan operasional dan mengurangi kesalahan perencanaan bagi DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Dr.H. ERZALDI ROSMAN,S.E.,M.M





